



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DENGAN DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DEPUTI KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RESIKO, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGERA REPUBLIK
INDONESIA, PT. JASA MARGA, PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PT.
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
MALANG, JAWA TIMUR
TANGGAL 18 September 2023 – 20 September 2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan

Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi

berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Deputi keuangan dan Manajemen Resiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, PT. JASA MARGA, PT. PP, PT. SMI. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT. JASA MARGA, PT. PP, PT. SMI, Dirjen Kekayaan Negara kemeterian keuangan dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementrian BUMN. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang penyertaan modal negara (PMN), mekanisme pelaksanaan dan alokasi PMN, pengawasan penggunaan PMN, kendala dan hambatan pelaksanaan PMN, manfaat dan dampak sosial PMN bagi masyarakat serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 – 20 September 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E.,M.M	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-18	Drs. H. FATHAN, M.A.P.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. PKB
7.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAGSET. BAKN
11.	--	FARID	STAF SET. BAKN
12.	--	NURUL ISTIQLAL	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.	--	HAEDAR HAKIM HUSAINY	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	FEBRI KUNTARTO	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	ARMMYTA PRADIPTA	TV PARLEMEN
17.	--	TIARA SAUM	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL
18.		ANNISA SEPTIYANI	STAFF BIRO

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Deputi keuangan dan Manajemen Resiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negera Republik Indonesia, PT. JASA MARGA, PT. PP, PT. SMI, dihadiri oleh:

1. Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementrian BUMN diwakili oleh Asdep Bidang Jasa Logistik Ibu Desty Arlaini
2. Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN provinsi Jawa Timur, Bapak Tugas Agus Priyo Waluyo
3. PT. Jasa Marga diwakili oleh :
 - a. Bapak Agus Setiawan – Dir.PU Jasa Marga
 - b. Ibu Pramitha Wulanjani – Dir. KMR JM
 - c. Ibu Netty Renova - Dirut Jasamarga Pandaan Malang
 - d. Bp. Agung Laksana - Head of Internal Audit
 - e. Bp. Aldrin Maulana - Business Development Group Head
 - f. Bp. Trias Andrianto - Corporate Planning & Portfolio Management Group Head
 - g. Ibu Siti Sarah - Dir Keuangan Jasamarga Trans Jawa Tol

4. PT. PP, diwakili oleh :
 - a. Bapak Novel Arsyad - DU
 - b. Bapak Agus Purbianto - DKMR
 - c. Bapak Bakhtiyar Efendi - SVP Corsec

5. PT. SMI

- a. Bapak Pradana Murti – Dir. Manajemen Resiko PT.SMI

Pada pertemuan dengan PT.Jasa Marga, PT.PP, PT.SMI serta Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, dan BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan penyertaan modal negara sebagai berikut.

Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN.

1. PT. PP dan PT Jasa marga mendapatkan PMN pada tahun 2016 sejumlah Rp2.250 Miliar dan Rp1.250 Miliar. Tambahan PMN TA 2016 pada PT. PP dan Jasa Marga dalam rangka mendukung program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 “Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia” melalui Percepatan Pembangunan Konektivitas. Selain itu, PMN TA 2016 ini juga selaras dengan program yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015- 2019 “Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi serta pasokan energi.”
2. Berdasarkan PER-02/MBU/03/2023, PMN dapat diberikan kepada BUMN dalam rangka Penugasan Pemerintah, Restrukturisasi, dan Pengembangan Usaha. Berdasarkan kinerja Perusahaan sampai dengan Semester I 2023 serta melihat proyeksi kegiatan investasi Perusahaan kedepan, Perusahaan saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pendanaannya melalui pembiayaan hutang, asset recycling, dan equity financing dari portofolio Perusahaan.
3. Kendala yang dialami yaitu Dikarenakan sebagian besar peruntukan dana PMN pada PTPP dan JSMR digunakan untuk pembangunan ruas jalan tol, pembebasan lahan menjadi salah satu critical factor dalam penyerapan dana dan penyelesaian proyek yang dibiayai dari PMN.

Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia

1. PMN tunai Rp2,25 T tahun 2016 kepada PT PP. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha PT PP melalui tambahan modal kerja serta mempertahankan porsi kepemilikan negara. Dengan bantuan dana PMN TA 2016, saat ini PT PP telah berhasil menyelesaikan pengembangan Pelabuhan dan 7 ruas jalan tol sepanjang 374,8 km yang merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Percepatan pembangunan infrastruktur

memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan mekanisme right issue, PT PP juga memperoleh pendanaan dari publik untuk modal kerja. Perbaikan kondisi keuangan dan kinerja operasional PT PP tercermin dari meningkatnya laba, likuiditas dan kinerja bersamaan dengan meningkatnya aset.

2. PMN tunai Rp1.25 Triliun tahun 2016 kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui penerbitan saham baru dengan metode rights issue. Dengan bantuan dana PMN yang diberikan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol baru untuk rute Semarang - Batang (75 km), Pandaan - Malang (37,6 km) dan Jakarta - Cikampek II (64 km). Penambahan PMN juga memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat sekitar seperti menambah peluang lapangan pekerjaan baru pada masa konstruksi maupun pada masa operasi. Penyerapan tenaga kerja pada proses pembangunan jalan tol ini mencapai 9081 orang.
3. PMN senilai total Rp30,516 triliun dari tahun 2008 sampai dengan 2017. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan untuk proyekproyek infrastruktur yang strategis. Dengan bantuan dana PMN yang diberikan, PT SMI telah berkontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional di mana hingga tahun 2022 PT SMI telah berhasil menyediakan fasilitas pembiayaan kepada 435 proyek dengan total nilai proyek sebesar Rp819,94 triliun. Penambahan PMN kepada PT SMI yang akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional akan menciptakan *multiplier effect* dan memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan domestik, penyediaan lapangan pekerjaan, serta menurunkan kesenjangan dan kemiskinan di masyarakat. Penambahan PMN juga memberikan peningkatan kinerja PT SMI baik dari sisi kinerja keuangannya maupun kinerja operasional.

PT SMI

1. PT. SMI sebagai katalis pembangunan nasional sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, telah menerima dana PMN dengan total Rp.30,5 Triliun. PMN yang telah diterima oleh PT.SMI yang digunakan untuk proyek pembangunan nasional telah memberikan dampak pada perekonomian nasional berupa penciptaan output, nilai tambah, pendapatan, dan tenaga kerja.
2. Implementasi proyek perlu menunggu di terbitkannya peraturan yang khusus untuk PMN. Utilisasi PMN pada saat itu adalah untuk pembiayaan proyek, sehingga terdapat kendala di sisi waktu penyelesaian penyiapan proyek sampai dengan proyek siap dibiayai. Dalam hal ini, penyiapan proyek dilakukan oleh project owner yang bukan merupakan kewenangan perseroan.

PT. PP

1. Terkait temuan BPK, PT PP telah membuat rekening giro khusus untuk menampung dana Right Issue baik yang berasal dari PMN maupun Dana Publik dan tidak digunakan untuk rekening operasional Perusahaan.

Selanjutnya terhadap dana hasil Right Issue ditempatkan pada rekening deposito khusus PMN. Total Bunga Deposito PMN sd Desember 2022 adalah Rp187.210.478.074 dan akan dipergunakan untuk setoran modal Tol Semarang – Demak.

2. PTPP telah memiliki beberapa prosedur untuk pengelolaan dana PMN yang meliputi, Prosedur Investasi, Prosedur Portofolio Investasi Perusahaan, Prosedur Divestasi, dan Prosedur Pengelolaan Dana PMN. Selain itu, telah dilakukan LHP Evaluasi Pengelolaan Dana PMN
3. Atas dana talangan yang terjadi di BUJT sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUJT tersebut dan dana talangan yang dibayarkan oleh BUJT tidak menggunakan dana dari PMN. Adapun PT PP (Persero) Tbk merupakan Pemegang Saham Minoritas pada masing-masing BUJT tersebut.
4. Outpunya Dana PMN Memperkuat permodalan mempercepat progress pelaksanaan Pembangunan Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi, Tol Depok-Antasari, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Pandaan Malang, Tol Manado Bitung, Apartemen MBR, Tol Serang Panimbang, Tol Semarang Demak, dan Feeding konstruksi sehingga memberikan peningkatan laba usaha serta gain dari proses divestasi.
5. Hambatan yang dialami antara lain :
 - Proses pengajuan, persetujuan, pencairan PMN, serta permohonan realokasi penggunaan dana PMN cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama sedangkan beberapa asset investasi yang akan didivestasi berasal dari dana PMN
 - Belum ada ketentuan terkait closing report / selesainya masa pelaporan PMN.
 - Missmatching antara waktu pencairan dana PMN dengan waktu dimulainya proyek, sementara pelaksanaan proyek tidak bisa ditunda.

PT. JASA MARGA

1. PT.JASA MARGA telah menerima dana PMN pada tahun 2016 sebesar Rp. 1, 250 Triliun. Dana PMN dipergunakan untuk pembangunan jalan tol sebagai berikut;
 - a. Pembangunan Ruas Jalan Tol Batang-Semarang (PT Jasamarga Semarang Batang) 75 km sebesar Rp625 miliar
 - b. Pembangunan Ruas Jalan Tol Pandaan-Malang (PT Jasamarga Pandaan Malang) 37,62 km sebesar Rp375 miliar
 - c. Pembangunan Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek) 36,40 km sebesar Rp250 miliar
2. Outout dari dana PMN yang diterima PT.Jasa Marga yaitu :
 - a. Penggunaan Dana: Dana PMN digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan untuk pelaksanaan percepatan proyek pembangunan jalan tol pada ruas Batang-Semarang, Pandaan Malang, dan Jakarta Cikampek II Elevated yang dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).
 - b. Peningkatan performa keuangan Perusahaan: Dengan beroperasinya jalan tol baru berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan pendapatan dan potensi pertumbuhan laba.
3. Outcome nya antara lain :
 - a. Manfaat Sosial dan Ekonomi: Pembangunan jalan tol dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperpendek waktu perjalanan, dan

- mengurangi kemacetan lalu lintas, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan daya saing ekonomi nasional.
- b. Peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas: Peningkatan mobilitas atas proses distribusi produk dan jasa di wilayah yang di layani jalan tol sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
 - c. Meningkatkan pendapatan Negara: Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung menyumbang pendapatan negara, antara lain melalui setoran pajak.
4. Kendala dan hambatan yang dialami antara lain :
- a. Proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan PMN serta permohonan realokasi penggunaan dana PMN cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak pihak dan regulasi. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.
 - b. Penyaluran PMN ke Jasa Marga dilaksanakan melalui program rights issue dimana dengan skema tersebut melibatkan seluruh pemegang saham, baik Pemerintah maupun pemegang saham public. Sehingga, perusahaan harus memenuhi peraturan OJK dan peraturan pasar modal lainnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

1. PT. PP dan PT Jasa marga mendapatkan PMN pada tahun 2016 sejumlah Rp2.250 Miliar dan Rp1.250 Miliar. Tambahan PMN TA 2016 pada PT. PP dan Jasa Marga dalam rangka mendukung program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 “Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia” melalui Percepatan Pembangunan Konektivitas.
2. PMN tunai Rp2,25 T tahun 2016 kepada PT PP. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha PT PP. PMN tunai Rp1.25 Triliun tahun 2016 kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PMN senilai total Rp30,516 triliun dari tahun 2008 sampai dengan 2017 ke PT.SMI. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan untuk proyekproyek infrastruktur yang strategis.
3. PT. SMI sebagai katalis pembangunan nasional sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, telah menerima dana PMN dengan total Rp.30,5 Triliun. PMN yang telah diterima oleh PT.SMI yang digunakan untuk proyek pembangunan nasional telah memberikan dampak pada perekonomian nasional berupa penciptaan output, nilai tambah, pendapatan, dan tenaga kerja.
4. Outpunya Dana PMN Memperkuat permodalandan mempercepat progress pelaksanaan Pembangunan Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi, Tol Depok-Antasari, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Pandaan Malang, Tol Manado Bitung, Apartemen MBR, Tol Serang

Panimbang, Tol Semarang Demak, dan Feeding konstruksi sehingga memberikan peningkatan laba usaha serta gain dari proses divestasi.

5. PT.JASA MARGA telah menerima dana PMN pada tahun 2016 sebesar Rp. 1, 250 Triliun. Dana PMN dipergunakan untuk pembangunan jalan tol

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT. SMF dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementria BUMN. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan kementerian/Lembaga terkait dan BUMN atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara di Indonesia.
